

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan suatu entitas apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali. Terkadang juga menggunakan keduanya.

Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi suatu entitas. Sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini berupa laporan tentu ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan atasan. Biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi.

Jika melihat dari penjelasan di atas tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten kepulauan mentawai disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten kepulauan mentawai selama satu periode pelaporan

Laporan keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transaksi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya laporan keuangan yang disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan / perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun

anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan mentawai.

Sesuai dengan pemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sekretariat daerah kabupaten kepulauan mentawai selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan tersruktur selama satu periode pelaporan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi nya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada sekretariat daerah sebagai satu entitas akuntansi yang terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca

- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola sekretariat daerah kabupaten kepulauan mentawai dalam satu periode pelaporan

- a. pendapatan
- b. belanja
- c. transfer
- d. surplus/ defisit
- e. pembiayaan
- f. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran

laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu setiap entitas pelapo mengklasifikasi asset nya dalam asset lancar dan tidak lancer serta mengklasifikasi kewajibanya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

c. Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 Tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah maka disusun laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikanya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat di pertanggungjawabkan.

d. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas awal, surplus / deficit laporan operasional koreksi dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya . LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disusun agar laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan realitas anggaran dan neraca menyajikan:

- a. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan, ekonomi makro ,pencapaian target undang APBN / perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasa rpenyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- ⇒ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
- ⇒ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara
- ⇒ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- ⇒ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- ⇒ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintahan pusat dan daerah
- ⇒ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 telah menjadi peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
- ⇒ Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- ⇒ Peraturan menteri dalam negeri No 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2007 tentang

perubahan atas pmendagri No mor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

- ⇒ Peraturan menteri dalam negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas pmendagri No 37 Tahun 2013 mengenai kebijakan perjalanan daerah
- ⇒ Peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual
- ⇒ Pemerintah daerah No 05 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015
- ⇒ Peraturan daerah No. 07 Tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016
- ⇒ Peraturan bupati No. 35 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016
- ⇒ Peraturan bupati No. 39 Tahun 2015 tentang standar biaya tahun anggaran 2015
- ⇒ Peraturan bupati No 35 Tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015
- ⇒ Peraturan bupati kepulauan mentawai Nomor 32 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pemerintah kabupaten kepulauan mentawai yang diubah dengan peraturan bupati kepulauan mentawai Nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas kebijakan akuntansi berbasis akrual pemerintah kabupaten kepulauan mentawai.
- ⇒ Peraturan bupati kepulauan mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sekretarit daerah kabupaten kepulauan mentawai.

1.3 Sitematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya catatan atas laporan keuangan SKPD keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II : Iktisar Pencapaian Kerja Target Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Taget Yang
Telah Ditetapkan

BAB III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 : Rincian dari Penjelasan dari Masing masing Pos Pos Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Pendapatan - LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendapatan - LO

3.1.4 Beban

3.1.5 Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekiutas Dana

3.2 : Pengungkapan atas Pos-pos dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan
dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan
Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan
Basis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB IV : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB V : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Targer Kinerja Keuangan Pemerintah

Secara umum dapat digambarkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Rp. 53.684.789.261,00 terealisasi Rp. 51.524.260.006,00 sehingga bobot target pencapaian kerja keuangan mencapai 95,98 % artinya secara keseluruhan pencapaian target kinerja keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah baik.

1. Metode pengukuran pencapaian target kinerja keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan diukur dengan menggunakan metode membandingkan rencana kinerja anggaran sebagai dialokasikan dalam rencana kerja anggaran (RKA) kegiatan dokumen pengguna anggaran Sekretariat Daerah kabupaten kepulauan mentawai dengan realisasi yang dicapai selama tahun anggaran

2. Analisis atas pencapaian target kinerja keuangan

Rincian analisis masing-masing pencapaian target kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut

2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.824.309.059,00 untuk gaji selama 12 bulan ditambah 2 bulan gaji ke 14 tambah penghasilan berdasarkan tempat bertugas selama 12 bulan dimana tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dilingkungan kabupaten kepulauan mentawai pembayarannya dilakukan berdasarkan persentasi kehadiran PNS selama satu bulan, dilihat dari anggaran tersebut realisasi sebesar Rp. 9.385.076.632,00 atau 95,53%

Indikator pencapaian target kinerja keuangan pada program ini dapat dilihat pada table berikut:

Table 1 Pencapaian target dan realisasi gaji dan tambahan penghasilan lainnya

Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
Gaji dan Tunjangan	14	14	Kali	6.287.473.229,00	6.025.428.361,00	95,83
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	12	12	Kali	3.536.835.830,00	3.359.648.271,00	94,99

2.1.2 Belanja Operasi dan Belanja Modal

Program ini terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.860.480.202,00 dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 42.139.183.374,00 dengan persentase pencapaian 96,08 % pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja (ouput) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, masing-masing terealisasi sebagaimana disajikan dalam table kinerja keuangan Indikator pencapaian target kinerja keuangan pada program ini dapat dilihat sebagai berikut

Table 2 Target dan realisasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Keuangan	
	Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	%
Belanja Pegawai	14	0	Jenis	9.824.309.059,00	9.385.076.632,00	95,53
Belanja Barang Dan Jasa	88	0	Unit	33.956.567.412,00	32.312.174.494,00	95,16
Belanja Hibah	2	0	Jenis	6.628.000.000,00	6.628.000.000,00	100
Belanja Bantuan Sosial	1	0	Jenis	120.000.000,00	54.000.000,00	45
Belanja Modal	23		Unit	3.155.912.790,00	3.145.008.880,00	99,65

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

- 1 Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan time schedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kurang optimal
- 2 Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum optimal sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran
- 3 Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilingkungan Sekretariat Daerah
- 4 Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing masing pos-pos Pelaporan Keuangan

3.1.1 Penjelasan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah (kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kasda akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi pengeluaran). Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Pendapatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah 0.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretariat Daerah
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	
Pendapatan Pajak Daerah	0	
Pendapatan Retribusi Daerah	0	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
Lain lain PAD yang sah	0	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	

3.1.2 Penjelasan Belanja

Jumlah realisasi belanja operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan mentawai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 51.524.260.006,00 jumlah tersebut hanya mencapai Rp. 95,98% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 53.684.789.261,00

Belanja operasional

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.824.309.059,00 jumlah tersebut hanya mencapai 95,53% dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.9.385.076.632,00 jumlah belanja pegawai tahun 2023 dapat dirinci per jenis belanja, sebagaimana disajikan pada table 4 dibawah ini

Table 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	9.824.309.059,00	9.385.076.632,00	95,53
	- Gaji dan Tunjangan	5.816.923.229,00	5.604.768.361,00	96,35
	- Tambahan Penghasilan PNS	3.536.835.830,00	3.359.648.271,00	94,99
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	170.550.000,00	120.660.000,00	70,75
	- Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100

Pencapaian target belanja pegawai tahun 2023 dari masing-masing belanja pegawai sudah mencapai target dengan persentase 95,53%

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa per 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 32.312.174.494,00 atau 95,16 % dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 33.956.567.412,00 jumlah anggaran dan realisasi belanja barang dan Jasa tahun 2023 dapat dirinci perjenis belanja barang tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabe dibawah ini

Table 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9.739.790.220,00	9.538.531.707,00	97,93
2	Belanja Jasa Kantor	6.462.278.850,00	5.931.118.429,00	91,78
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	128.276.342,00	127.581.100,00	99,46
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	559.688.000,00	512.628.467,00	91,59
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	169.600.000,00	164.602.880,00	97,05
6	Belanja Sewa Aset Tetap lainnya	5.000.000	0	0
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	110.600.000,00	100.299.600,00	90,69
8	Belanja Kursus/Pelatihan	256.000.000,00	195.450.000,00	76,35
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.669.530.000,00	2.666.220.885,00	99,88
10	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2.264.000.000,00	2.238.813.599,00	98,89
11	Belanja Perjalanan Dinas	7.629.414.000,00	7.149.102.827,00	93,70
12	Belanja Uang dan /atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	3.822.640.000,00	3.627.825.000,00	94,90

c. Belanja Hibah

Jumlah realisasi belanja hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.628.000.000,00 jumlah tersebut mencapai persentase realisasi 100% dari jumlah anggaran Rp. 6.628.000.000,00 dapat digambarkan pada table dibawah ini

Table 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100

	dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar			
2	Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	4.628.000.000,00	4.628.000.000,00	100

d. Belanja Bantuan Sosial

Jumlah realisasi belanja bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 adalah sebesar 54.000.000,00 jumlah tersebut mencapai persentase realisasi 45 % dari jumlah Anggaran Rp. 120.000.000,00

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	120.000.000,00	54.000.000,00	45

e. Belanja Modal

Jumlah realisasi modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 adalah sebesar 3.145.008.880,00 jumlah tersebut mencapai persentase realisasi 99,65 % dari jumlah anggaran Rp. 3.155.912.790,00 rincian perjenis dapat digambarkan pada table dibawah ini

Table 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan	2.315.227.000,00	2.315.171.400,00	100
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	189.715.700,00	188.322.000,00	99,27
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	194.499.210,00	191.713.230,00	98,57
4	Belanja Modal Komputer	454.320.380,00	447.651.750,00	98,53

5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.150.000,00	2.150.500,00	100
---	-----------------------------------	--------------	--------------	-----

3.1.3 Penjelasan Pendapatan Laporan Operasional

LO (Laporan Operasional) adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan Pada Laporan Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 0.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretariat Daerah
Laporan Operasional Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	
Pendapatan Pajak Daerah	0	
Pendapatan Retribusi Daerah	0	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
Lain lain PAD yang sah	0	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	

3.1.4 Penjelasan Beban

Beban adalah Penurunan Manfaat ekonomi atau Potensi Jasa dalam Periode Pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2023
Beban Pegawai	9.824.309.059,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.816.923.229,00
Belanja Tambahan Penghasilan	3.536.835.830,00
Belanja Penghasilan Berdasarkan	170.550.000,00

Pertimbangan Objektif lainnya	
Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH	300.000.000,00

b. Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2023
Belanja Bahan Pakai Habis	9.739.790.220,00

c. Beban Jasa

Uraian	Tahun 2023
Belanja Jasa Kantor	6.462.278.850,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	128.276.342,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	559.688.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	169.600.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	110.600.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	256.000.000,00

d. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2023
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.669.530.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.264.000.000,00

e. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2023
---------------	-------------------

Belanja Perjalanan Dinas	7.629.414.000,00
--------------------------	------------------

f. Beban Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2023
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat	3.962.390.000,00

g. Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2023
Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00
Belanja Hibah Kepada badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.628.000.000,00

h. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada individu	120.000.000,00

i. Beban Penyusutan

Uraian	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.680.997.263
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	558.031.088

Beban Penyusutan Jalan,Jaringan,dan Irigasi	161.940.474
---	-------------

3.1.5 Aset

aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.dapat dilihat pada tabel kondisi Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Aset Lancar

Aset Lancar adalah Aset yang mana penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat,masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun.

URAIAN	2022	MUTASI	2023
Kas	0	0	0
Piutang	0	0	0
Persediaan	2.820.000	0	3.608.000
Biaya Dibayar dimuka	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	2.820.000	0	3.608.000

Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

URAIAN	2022	MUTASI	2023
Tanah	21.013.844.000	120.000.000	21.133.844.000
Peralatan dan Mesin	43.785.470.246	2.481.373.575	46.266.843.821
Gedung dan Bangunan	29.098.405.170	0	29.098.405.170

Jalan,Jaringan,dan Irigasi	6.800.515.032	0	6.800.515.032
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(32.098.681.470)	(2.104.714.447)	(34.203.395.917)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.799.800.770)	(558.031.088)	(7.357.831.858)
Akumulasi Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi	(2.999.736.016)	(161.940.474)	(3.161.676.490)
Jumlah Aset Tetap	60.018.901.742	(223.312.434)	59.795.589.308

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah Aset yang tidak bersifat fisik dan dapat diklarifikasikan sebagai aset tidak terbatas atau pasti

URAIAN	2022	MUTASI	2023
Software	839.700.000	0	839.700.000
Jumlah Aset Tidak Berwujud	839.700.000	0	839.700.000

Aset Lain lain

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

URAIAN	2022	MUTASI	2023
Aset Lain lain	32.135.688.192	(1.292.385.215)	30.843.302.977
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(839.700.000)	0	(839.700.000)

Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasional	6.720.516.285	0	6.720.516.285
Mutasi Kurang catat BMD	238.000,00	(238.000,00)	0
Barang yang dikuasai Pihak Ketiga	(843.773.500,00)	843.773.500	0
Aset Tidak Berwujud	839.700.000,00	0	839.700.000
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(31.659.664.492,00)	1.292.385.215	(30.367.279.277)
Jumlah aset lainnya	476.023.700		476.023.700

3.1.6 Kewajiban

kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

URAIAN	2022	MUTASI	2023
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0

3.1.7 Penjelasan Laporan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri ekuitas awal surplus / defisit laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelapor dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE menyediakan

informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	60.497.745.442,00	62.196.822.727,00
2	Surplus / defisi LO	(51.884.866.372,00)	(52.584.364.958,00)
3	RK PPKD	51.523.925.947,00	50.490.371.917,00
4	Lain Lain	138.415.991	394.915.756
5	Mutasi Tambah tanah Pendopo	120.000.000,00	0
6	Mutasi Tambah Personal Computer dari Kominfo	4.830.054,00	0
7	Mutasi Tambah Peralatan Jaringan dari Kominfo	13.585.937,00	0
	Ekuitas akhir	60.275.221.008,00	60.497.745.442,00

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah

Penjelasan perbedaan LO dan LRA

LO (Laporan Operasional) adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus/defisit. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Pengungkapan perbedaan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah dikarenakan Biaya/ Beban Penyusutan/Amortisasi pada Belanja Modal.

LO	LRA
(51.884.866.372,00)	(51.524.260,006,00)

Penjelasan Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pengungkapan pada Laporan Neraca

Pengungkapan Laporan Neraca atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya di pengaruhi beberapa hal antara lain :

Berkurang Nilai Tanah karena adanya mutasi

Berkurangnya Nilai Peralatan dan Mesin disebabkan adanya Reklas, Mutasi dan Perubahan Kondisi Aset dari Baik ke Rusak Berat.

Akumulasi Penyusutan Aset bertambah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kepulauan di Provinsi Sumatera Barat yang terletak dipantai barat Sumatera. Kabupaten ini merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Samudera Hindia, sehingga sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 99 pulau, terdiri dari 4 pulau besar (P.Siberut, P.Sipora, P.Pagai Utara dan P.Pagai Selatan) dan 95 pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan, dengan luas daratan 7.018,19 Km dan lautan lebih kurang 78.000 Km wilayah lautan yang diukur 4 mil keluar pada saat air surut terhadap pulau-pulau terluar. Serta Panjang garis pantai 1.402,66 Km.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada koordinat (letak astronomi) $0^{\circ} 55' - 3^{\circ} 20' \text{ LS}$ dan $98^{\circ} 31' - 100^{\circ} 40' \text{ BT}$, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kab.Nias Selatan
- Sebelah Utara dengan Selat Mentawai
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan urusan pemerintah dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya, Urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup urusan :

- a.Pendidikan;
- b.Kesehatan;
- c.Pekerjaan Umum;
- d. Dst...

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a.Pertanian;
- b.Kehutanan;

c. Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. Dst...

Setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama setahun yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berasal dari APBD tahun 2023 senilai Rp. 53.684.789.261,00 yang terdiri dari belanja pegawai senilai Rp.9.824.309.059,00 belanja barang dan jasa senilai Rp. 33.956.567.412,00 dan belanja modal senilai Rp. 3.155.912.790,00 ,belanja bantuan sosial Rp.120.000.000,00 dan belanja Hibah Rp.6.628.000.000,00

Realisasi Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 51.524.260.006,00 atau sebesar 95,98% dari nilai pagu yang telah ditetapkan yang terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp. 9.385.076.632,00 realisasi belanja barang dan jasa Rp. 32.312.174.494,00 dan realisasi belanja modal Rp. 3.145.008.880,00, belanja bantuan sosial Rp. 54.000.000,00 belanja hibah Rp.6.628.000.000,00.

Pada saat tahun berjalan terjadi kelebihan pembayaran(*contra post*) dan telah disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp.0 sisa uang dipertanggungjawabkan (UUDP) / uang yang harus disetor (UYHD) sebesar Rp. 0 sehingga kas dibendahara pengeluaran Tahun2023 adalah Rp. 0